BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1. Sejarah Perusahaan

Bank Jabar demikian sebutan untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat milik Pemerintah Daerah Jawa Barat. Pendirinya dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 Tahun 1960 tentang peraturan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu di N.V Denis (De Earste Nederlands Indische) terkena ketentuan ini, di nasionalisasi dan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan tersebut, pemerintah daerah Jawa Barat mendirikan PT Bank Karya Pembangunan dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961. Untuk pertama kali modal dasarnya sebesar Rp. 2.500.000,00 berasal dari kas pemerintah daerah. PT Bank Karya Pembangunan kemudian disingkat BKP. Kemudian menjadi perusahaan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur nomor : 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961.

Untuk selanjutnya dikuatkan dengan Peraturan Daerah nomor II/PD-DPRD/72 tanggal 20 Juli 1972. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, terhadap peraturan daerah yang merupakan landasan operasional dilakukan beberapa kali penyempurnaan. Sesuai Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1996, modal dasar Bank Jabar ditentukan sebesar Rp. 250 milyar.

Sebelum menempati kantor pusat yang baru, Jl. Naripan 12-14 Bandung Bank Jabar menempati gedung eks. N.V.Denis terletak di persimpangan Jalan Braga dan Jalan Naripan Bandung satu-satunya Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang peresmian pendiriannya oleh Pj. Presiden Republik Indonesia, waktu itu Bapak ir.H.Djuanda Kartawidjaja.

Aktivitas Bank Jabar sebagai Bank Umum, sejak tahun 1992 statusnya meningkat menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28/84 /KEP/DIR tanggal 22 November 1992. Disamping itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan "Bank Jabar" dan Logo baru berdasarkan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 1995. Dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan perekonomian dan perbankan, maka bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Pendirian nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan Akta Perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 16 April 1999.

2.2.Tempat danKedudukan Perusahaan

Bank Jabar Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pangandaran bertempat di Jln. Merdeka No.312 Pangadaran. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 28/84/KEP/DIR tanggal 22 November 1992, menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bank Jabar adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan perusahaan : adalah Bank Umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 tahun 1995.

b. Tugas Pokok Perusahaan : membantu kantor cabang yang bertempat di Jln. Jend. Sudirman No.71 Ciamis. Bank sebagai lembaga keuangan memberikan berbagai pelayanan untuk para nasabah dalam berbagai bentuk fasilitas, agar masyarakat tertarik untuk menyimpan atau menanamkan modalnya. Sehingga Bank akan memberikan timbal baliknya dari penyimpanan tersebut.

c. Fungsi Perusahaan : adalah sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, melaksanakan penyimpanan uang daerah, dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3.Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Aktivitas Bank Jabar sebagai Bank Umum, sejak tahun 1992 statusnya meningkat menjadi Bank Umum Devisa. Disamping itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan "Bank Jabar".

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, bentuk hukum Bank Jabar pertama adalah Perusahaan Daerah (PD) dan diganti menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Pendirian Nomor.4 tanggal 8 April 1999 dan Akta Perbaikan Nomor.8 tanggal 15 April 1999 yang disyahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 16 April 1999.

2.4.Bidang Pekerjaan Perusahaan

Bank Jabar dalam kegiatan perbankannya yang berlaku dan dijalankan berdasarkan:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.33 tahun 1960.
b. Akta Notaris Noezar Nomor.152 tanggal 21 Maret 1961 dan Nomor.184 tanggal 13 Mei 1961.
c. Surat Keputusan Gubernur Nomor.7/GKHD/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961
d. Peraturan Daerah Nomor.II/PD-DPRD/72 tanggal 20 Juli 1972.
e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor.28/84/KEP/DIR tanggal 22 November 1992
f. Akta pendirian Nomor.4 tanggal 8 April 1999 dan akta perbaikan tanggal 15 April 1999.

Perusahaan dalam pembangunan daerah disesuaikan dengan program pemerintah. Didasarkan pada pembangunan di daerah. Perusahaan ini berhubungan langsung dengan masyarakat supaya tercipta adanya komunikasi. Begitu pula tercapainya semua tujuan, yaitu komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat.

Dalam hal ini Bank Jabar sebagai lembaga keuangan memberikan berbagai pelayanan untuk para nasabah dalam berbagai bentuk fasilitas. Agar masyarakat tertarik untuk menyimpan atau menanamkan modalnya. Sehingga Bank akan memberikan timbal baliknya dari penyimpanan tersebut, misalnya:

a. Bank mengadakan undian yang berdasarkan nomor rekening giro dengan menawarkan berbagai macam hadiah baik berupa uang maupun barang.
b. Bank juga memberikan fasilitas kredit bagi nasabah yang memenuhi persyaratan kredit, dan lain-lain.

2.5.Bidang Pekerjaan Divisi/Perusahaan Tempat Kerja Praktek

Manajemen Bank Jabar terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris merumuskan kebijaksanaan pengawasan serta pengelolaan Bank, sedangkan Direksi melaksanakan kebijaksanaan dan pengelolaan operasional sehari-hari. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan orang Komisaris. Direksi terdiri dari seorang Direktur utama dan 3 orang Direktur yang dibantu oleh para Kepala Divisi, yaitu:

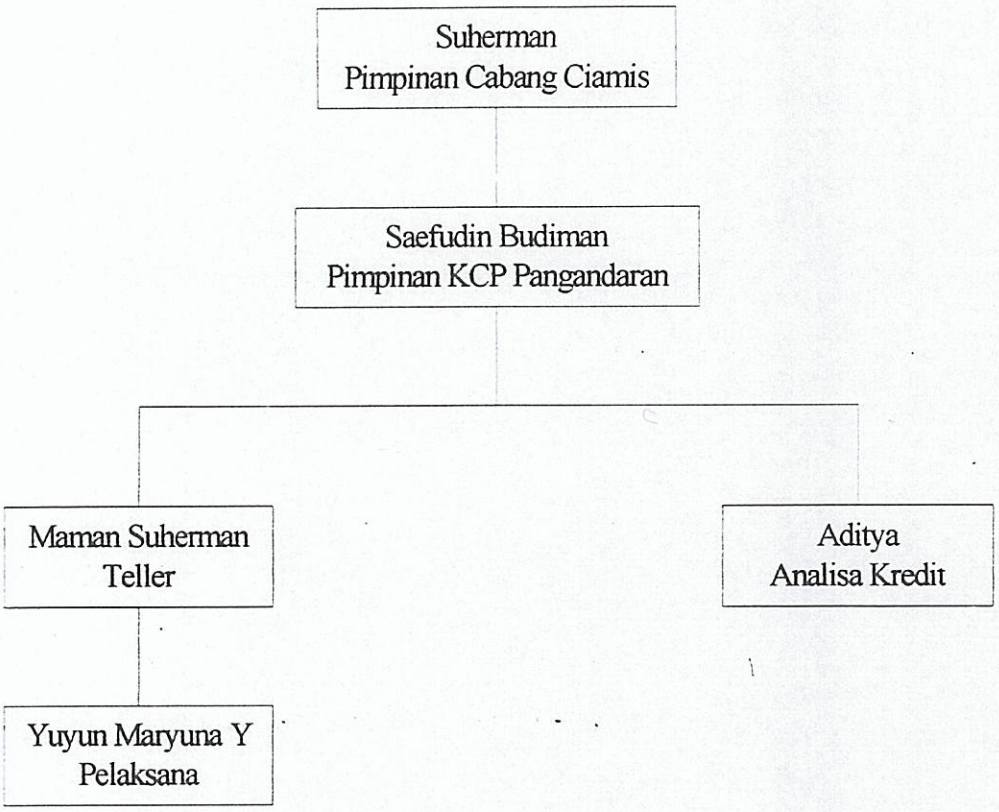
1. Pemimpin Divisi Perencanaan dan Pengembangan
2. Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan
3. Pemimpin Divisi Perkreditan
4. Pemimpin Divisi Teknologi Industri
5. Pemimpin Divisi Trisuri
6. Pemimpin Divisi Audit Intern
7. Pemimpin Divisi Umum
8. Pemimpin Sumber Daya Manusia
9. Pemimpin Divisi Usaha Syariah

Struktur di kantor pusat, dibawah divisi ada bagian dan seksi dan kantor pusat membawahi cabang-cabang yang tersebar diberbagai kabupaten di daerah Jawa Barat. Dan Kantor Cabang dibantu oleh Kantor Cabang Pembantu yang bertempat di kecamatan pilihan.

2.6.Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan suatu landasan organisasi untuk menentukan pembagian tugas, tanggung jawab, dan pelimpahan wewenang secara jelas. Sehingga organisasi structural dapat dilaksanakan dengan baik guna menunjang aktifitas perusahaan.

Struktur organisasi Bank Jabar Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pangandaran, yaitu:



Gambar 2.1. Struktur organisasi


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM